

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan sebelumnya berasal sentralisasi menjadi desentralisasi. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. Pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki kemandirian.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat (Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014). Pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh oleh pemerintah pusat untuk mampu melakukan segala urusan pemerintahan sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, otonomi daerah memiliki peran yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar

mampu membangun daerahnya. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. (Halim, 2007)

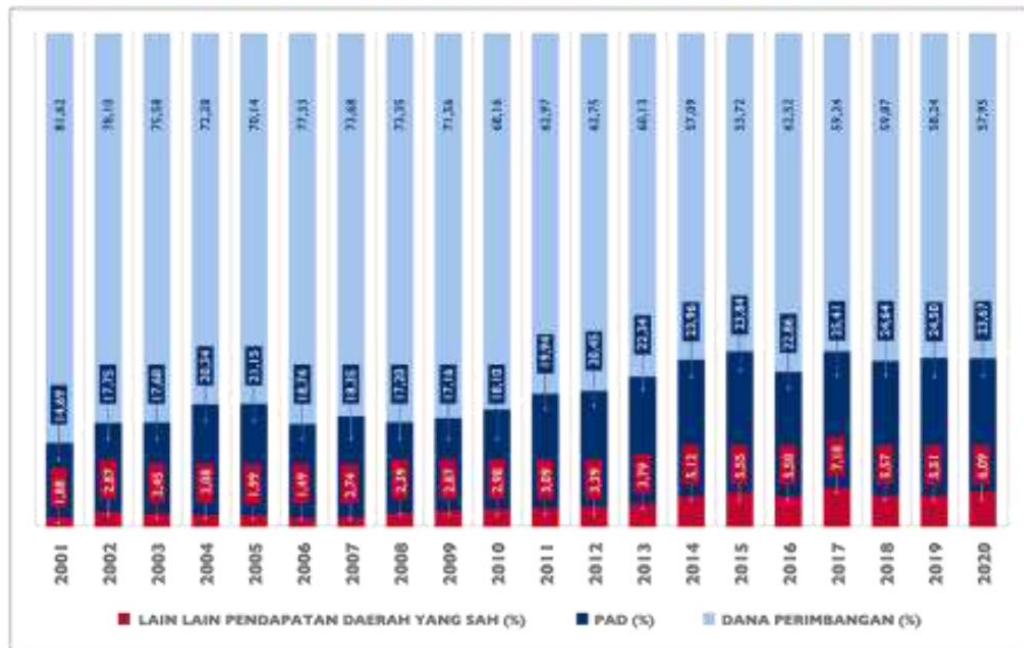
Sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja masih di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama. Di era otonomi diharapkan daerah menjadi lebih mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan meningkatnya PAD satu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah (Karouw, Engka, & Tolosang, 2022).

Kemandirian suatu daerah tidak berarti setiap daerah mampu membiayai seluruh pengeluaran pendapatan, namun kemandirian dalam membiayai setidaknya adalah pengeluaran rutin dengan PAD tetap merupakan usaha yang harus

ditingkatkan, karena ditinjau dari derajat kebijakan penggunaan dana, PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling memberikan otonomi kepada daerah (Syahril, DM, & Handayani, 2023).

kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman (Halim, 2007). Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar PAD sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintah daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana.

Lalu yang membelakangi penelitian ini adalah perkembangan setiap jenis PAD dari tahun 2001-2020 yang masih bermasalah. Berikut grafik Perkembangan Kotribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2001-2020 :



Sumber : Kementrian Keuangan (diolah)

Gambar 1. 1

**Perkembangan Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun
2001-2020**

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan perkembangan setiap jenis PAD dari tahun 2001-2020. Pada grafik tersebut diketahui bahwa sebagian besar PAD adalah pajak daerah dengan porsi rata-rata terhadap total PAD sebesar 70,16%. Sementara itu, rata-rata porsi jenis PAD lainnya seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah masing-masing sebesar 8,94%, 3,45% dan 17,45%.

Penerimaan pajak daerah selama ini terus mengalami kenaikan dan terus tumbuh positif (kecuali pada tahun 2020) dengan rata-rata pertumbuhan pajak

daerah 16,72[^]. Pertumbuhan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 41,22%, meningkat dari Rp 56,18 triliun di tahun 2010 menjadi Rp 79,34 triliun. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh implementasi UU mengenai PDRB yang mengalihkan dua pajak pusat yakni BPHTB dan PBB P2 menjadi pajak daerah dan menambahkan jenis-jenis PDRB baru lainnya.

Sementara itu penerimaan retribusi daerah menunjukkan tren yang meningkat hingga tahun 2014 yang mencapai Rp 12,14 triliun. Pada tahun 2014 pula, penerimaan retribusi daerah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,18%. Setelah tahun 2014, penerimaan retribusi daerah cenderung mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp 9,79 triliun di tahun 2019 dan turun signifikan sebesar -14,10% di tahun 2020 menjadi Rp 8,41 triliun. Rata-rata pertumbuhan realisasi pada tahun 2015-2020 sebesar -5,71%. Penurunan retribusi daerah ini dapat disebabkan oleh tingkat pengguna jasa yang mengalami penurunan sehingga jumlah objek retribusi juga mengalami penurunan (Tryanti, 2016). Adapun penurunan retribusi daerah pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemic Covid-19 yang menyebabkan beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan aktivitas sehingga tingkat pengguna jasa objek retribusi juga mengalami penurunan drastic. Pemungutan retribusi lebih tergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat dan permintaan pelayanan dari masyarakat, berbeda dengan pajak yang pemungutannya lebih dipaksakan kepada wajib pajak, sehingga penerimaan retribusi daerah lebih berfluktuasi dibandingkan penerimaan pajak daerah (Halim, 2001)

Selanjutnya jika dilihat dari perkembangan realisasi komponen-komponen PAD selain PDRB terlihat bahwa lain-lain PAD yang sah, mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2007 sebesar 152,97%. Setelah tahun 2007, pertumbuhan lain-lain PAD yang sah menunjukkan tren yang meningkat. Sebaliknya, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan tren yang cenderung menurun.

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa Kemandirian keuangan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang erat kaitannya dengan Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Kemandirian keuangan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan barang dan jasa yang antara lain diukur dengan besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah provinsi maupun daerah Kabupaten atau Kota. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. PDRB sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unik kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu. (Mudji & Taripar, 2018).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian dengan judul “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Provinsi Bali” (Dewi & Sutrisna, 2014)” Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 1) Periode penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu pada tahun 2008-2012, 2) Populasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu pada kabupaten/kota di provinsi Bali.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2020-2022).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan antara lain:

1. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022.
2. Bagaimana Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022.
3. Bagaimana Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022.
4. Seberapa Besar Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022.

5. Seberapa Besar Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022.
2. Untuk mengetahui Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022.
3. Untuk mengetahui Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022.
4. Untuk mengetahui Besaran Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022.
5. Untuk mengetahui Besaran Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna, baik berguna secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperluas ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait yakni sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui seberapa pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi, serta dapat memenuhi salah satu syarat sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membantu penelitian selanjutnya khususnya tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Data yang digunakan penulis adalah data sekunder, maka penulis mengambil data yang diunduh dari *jabar.bps.go.id* dan situs lain yang dapat mendukung penelitian ini.